

ABSTRAK

UPAYA PENANGGULANGAN KEJAHATAN TERORISME DI WILAYAH LAMPUNG

(Studi pada Satuan Tugas Densus 88 Anti Teror Polri Wilayah Lampung)

Oleh
Adinda Ramadani

Terorisme termasuk dalam kejahatan luar biasa atau sebagai *extra ordinary crime* dan ditangani secara khusus berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, faktor terjadinya terorisme di Indonesia khususnya wilayah Lampung disebabkan berbagai hal seperti dari segi agama, kebudayaan, ekonomi, politik, sosial dan lainnya. Terorisme seringkali dipicu oleh keyakinan ideologis yang membenarkan penggunaan kekerasan sebagai alat untuk mencapai tujuannya. Upaya penanggulangan terorisme di wilayah Lampung tentu perlu dilakukan mengingat di wilayah Lampung masih terdapat kasus penangkapan terorisme. Kepolisian dalam hal ini Densus 88 Anti Teror Wilayah Lampung bekerjasama dengan FKPT/BNPT, Lembaga pemerintah, Akademisi, Organisasi dan Masyarakat untuk bersama-sama menanggulangi terorisme dan memberantas kelompok kontra ideologi. Penelitian yang dilakukan berdasarkan permasalahan terkait bagaimana upaya penanggulangan terorisme di wilayah Lampung dan juga apa saja faktor yang menghambat penanggulangan terorisme di Lampung.

Metode pendekatan pada penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris dengan menekankan pada kajian hukumnya dan ditunjang dengan pendekatan lapangan berupa perolehan informasi serta opini penegak hukum yang terkait dan jenis data terdiri dari data primer dan data sekunder. Narasumber merupakan Kepolisian Republik Indonesia dalam hal ini Anggota Densus 88 Anti Teror Wilayah Lampung, Anggota Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) yang merupakan kepanjangan tangan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) disetiap wilayah, dan Dosen/Akademisi Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Analisis data menggunakan analisis kualitatif.

Adinda Ramadani

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa upaya penanggulangan preventif pada tindak pidana terorisme yang dilakukan berbagai kalangan sudah maksimal namun diperlukan perluasan kerjasama agar temuan kasus tindak pidana terorisme melambung yang cukup signifikan dan tentunya hal tersebut membantu wilayah Lampung untuk terbebas dari terorisme yang masih ada belum ditemukan saat ini, kemudian upaya penanggulangan represif pada tindak pidana terorisme Densus 88 Anti Teror Wilayah Lampung berpendapat bahwa upaya penegakan hukum untuk tersangka terorisme telah dilaksanakan sesuai dengan Undang-undang Nomor 5 tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Saran dari penulis terhadap penelitian ini adalah hendaknya penanggulangan pada tindak pidana terorisme yang ada di wilayah Lampung perlu digencarkan dalam upaya penanggulangan preventif yang menitikberatkan pada pencegahan, Tidak hanya Densus 88 saja yang harus meningkatkan kinerja secara maksimal, Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) menjadi salah satu garda terdepan dalam upaya preventif penanggulangan terorisme ini, maka harus meningkatkan program-program pencegahannya, kemudian melakukan penyuluhan yang lebih intensif lagi dengan jangkauan yang jauh. Dalam upaya penanggulangan represif Densus 88 harus memperkuat teori penindakan yang nantinya dipraktekkan di lapangan dan selalu melakukan pengawasan terhadap narapidana terorisme untuk dipastikan benar sudah di deradikalisasi agar tidak bergabung lagi dalam terorisme.

Kata Kunci: Kejahatan Luar Biasa, Penanggulangan, Terorisme

ABSTRACT

EFFORTS COMBATING TERRORISM CRIMES IN LAMPUNG REGION (Study on the Densus 88 Anti-Terror Task Force of the Lampung Police Region)

By:

Adinda Ramadani

Terrorism is included in extraordinary crimes or as an extra ordinary crime and is handled specifically based on applicable legal provisions, the factors of terrorism in Indonesia, especially in the Lampung region are caused by various things such as religion, culture, economy, politics, social and others. Terrorism is often triggered by ideological beliefs that justify the use of violence as a tool to achieve its goals. Efforts to combat terrorism in the Lampung region certainly need to be carried out considering that in the Lampung region there are still cases of terrorism arrests. The police in this case Densus 88 Anti Teror Lampung Region collaborate with FKPT/BNPT, Government institutions, Academics, Organizations and the Community to jointly combat terrorism and eradicate counter-ideological groups. The research conducted aims to find out how efforts to combat terrorism in the Lampung region and also to find out what factors hinder the prevention of terrorism in Lampung.

The approach method in this study uses a normative legal approach and empirical legal approach with an emphasis on legal studies and supported by a field approach in the form of obtaining information and opinions from related law enforcers and the type of data consists of primary data and secondary data. The resource persons are the Indonesian National Police in this case, members of Densus 88 Anti Teror Lampung Region, members of the Terrorism Prevention Coordination Forum (FKPT) which is an extension of the National Counterterrorism Agency (BNPT) in each region, and Lecturers/Academics of the Criminal Law Section, Faculty of Law, University of Lampung. Data analysis uses qualitative analysis.

Based on the results of the study and discussion, it can be concluded that preventive efforts to combat terrorism carried out by various groups have been maximized, but it is necessary to expand cooperation so that the findings of terrorism cases soar significantly and of course this helps the Lampung region to be free from terrorism that still exists and has not been found at this time, then

Adinda Ramadani

repressive efforts to combat terrorism Densus 88 Anti Teror Lampung Region argues that law enforcement efforts for terrorism suspects have been carried out in accordance with Law Number 5 of 2018 concerning the Eradication of Terrorism.

The author's suggestion for this study is that the prevention of terrorism in the Lampung region needs to be intensified in preventive efforts that focus on prevention. Not only Densus 88 must improve its performance optimally, the Terrorism Prevention Coordination Forum (FKPT) is one of the front lines in preventive efforts to combat terrorism, so it must improve its prevention programs, then conduct more intensive counseling with a far reach. In an effort to overcome repressive Densus 88 must strengthen the theory of action that will later be practiced in the field and always supervise terrorist prisoners to ensure that they have been deradicalized so that they do not join terrorism again.

Keywords: *Extraordinary Crimes, Prevention, Terrorism*